



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 214 TAHUN 2026

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 214 TAHUN 2026

TENTANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2026

A. SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua		Indeks Dimensi Pendidikan	0,704	Indeks
2.	Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	1.	Usia Harapan Hidup	76,31	Tahun
		2.	Prevalensi <i>Stunting</i>	15	Persen
3.	Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	1.	Indeks Ketimpangan Gender	0,140	Indeks
		2.	Indeks Pembangunan Pemuda	71,03	Indeks
4.	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,91	Indeks
		2.	Indeks Demokrasi	85,78	Indeks
5.	Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi		Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4.106,64	Triliun Rupiah
6.	Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	1.	Indeks Daya Saing Daerah	4,11	Indeks
		2.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	34,32	Persen
7.	Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif	10,87	Persen
		2.	Jumlah Tamu Mancanegara	1.289.257	Orang
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,01	Persen
9.	Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,36	Indeks
		2.	Indeks Ketahanan Pangan	72,84	Persen
		3.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,175	Persen
10.	Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (84,35)	Predikat
		2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	Indeks
		3.	Indeks Integritas Daerah	77,60	Indeks

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
11.	Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur		Indeks Sistem Merit	359,53	Indeks
12.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	1,7	Indeks
		2.	Indeks Pelayanan Publik	4,55 (Prima)	Indeks
13.	Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1.	Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	97,38	Persen
		2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	71,94	Indeks
14.	Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak		Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	40,22	Persen
15.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,29	Indeks
16.	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana	52,51	Indeks
17.	Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi		Cakupan Layanan Angkutan Umum Massal	92,49	Persen
18.	Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit		People Near Transit	37,18	Persen

B. PROGRAM, ANGGARAN DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	9.279.477.037.356		Dinas Pendidikan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.408.129.973.334		Dinas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.657.295.734.182		Dinas Kesehatan
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	243.794.824		Dinas Kesehatan
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.153.395.047		Dinas Kesehatan
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.314.074.475.609		Dinas Sumber Daya Air
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.604.089.323		Dinas Sumber Daya Air

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	587.934.609.520		Dinas Sumber Daya Air
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.082.781.310.154		Dinas Sumber Daya Air
10.	Program Penataan Bangunan Gedung	367.141.879.918		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
11.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.187.652.911.921		Dinas Bina Marga
12.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.958.773.816		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
13.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	61.704.045.952		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
14.	Program Pengembangan Perumahan	1.146.145.532.597		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	290.550.228.971		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.195.855.694		Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Program Penanggulangan Bencana	41.242.933.806		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	369.229.849.121		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
19.	Program Pemberdayaan Sosial	12.860.400.000		Dinas Sosial
20.	Program Rehabilitasi Sosial	282.357.511.425		Dinas Sosial
21.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	863.196.571.806		Dinas Sosial
22.	Program Penanganan Bencana	26.040.103.899		Dinas Sosial
23.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.352.687.500		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
24.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	89.268.953.447		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
25.	Program Penempatan Tenaga Kerja	36.025.076.662		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
26.	Program Hubungan Industrial	2.167.955.000		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
27.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	5.018.977.906		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
28.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.331.372.000		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
29.	Program Perlindungan Perempuan	12.522.861.494		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
30.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.236.000.000		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
31.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	48.357.000		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
32.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.683.418.467		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
33.	Program Perlindungan Khusus Anak	13.343.701.343		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
34.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	657.012.193.365		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
35.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	37.717.440		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
36.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.527.822.631		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
37.	Program Penatagunaan Tanah	963.693.112		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
38.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	83.308.130.570		Dinas Lingkungan Hidup
39.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.048.661.009.496		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
40.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.298.048.752		Dinas Lingkungan Hidup
41.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.500.957.671		Dinas Lingkungan Hidup
42.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.597.036.408		Dinas Lingkungan Hidup
43.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	538.223.022		Dinas Lingkungan Hidup
44.	Program Pengelolaan Persampahan	1.748.647.927.384		Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
45.	Program Pendaftaran Penduduk	67.812.380.503		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46.	Program Pencatatan Sipil	5.596.856.916		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.806.887.766		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	394.877.008		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	702.288.582.585		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
50.	Program Pengendalian Penduduk	7.783.291.408		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
51.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.239.257.184		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
52.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.574.333.861		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
53.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.813.230.151.330		Dinas Perhubungan
54.	Program Pengelolaan Pelayaran	61.071.041.713		Dinas Perhubungan
55.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	793.650.000		Dinas Perhubungan
56.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75.025.298.948		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
57.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	763.067.281.869		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
58.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27.418.800		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
59.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	550.280.368		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
60.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.501.613.468		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
61.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	41.417.842.517		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
62.	Program Pengembangan UMKM	395.882.368		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
63.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.040.386.352		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
64.	Program Promosi Penanaman Modal	7.844.064.680		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
65.	Program Pelayanan Penanaman Modal	127.493.259.635		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
66.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3.524.638.428		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
67.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	19.279.961.283		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
68.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	17.826.923.856		Dinas Pemuda dan Olahraga
69.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	406.239.211.356		Dinas Pemuda dan Olahraga
70.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	6.896.945.487		Dinas Pemuda dan Olahraga
71.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	12.570.942.368		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
72.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	13.932.901.613		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
73.	Program Pengembangan Kebudayaan	157.202.563.560		Dinas Kebudayaan
74.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	7.604.878.334		Dinas Kebudayaan
75.	Program Pengelolaan Permuseuman	79.746.486.379		Dinas Kebudayaan
76.	Program Pembinaan Perpustakaan	87.368.653.965		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
77.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	396.238.112		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
78.	Program Pengelolaan Arsip	15.962.741.835		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
79.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	489.277.264		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
80.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.048.353.202		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
81.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.700.780.221		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
82.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	15.583.930.845		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
83.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.040.296.717		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	12.335.721.481		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	181.489.233.727		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
86.	Program Pemasaran Pariwisata	84.729.544.719		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
87.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	103.528.217.694		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
88.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.807.992.504		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.158.447.298		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
90.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.069.393.794		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
91.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	41.028.239.993		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
92.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	961.274.950		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
93.	Program Penyuluhan Pertanian	9.941.060.395		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
94.	Program Pengelolaan Hutan	45.212.981.770		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
95.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	171.227.298		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
96.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.442.244.810		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
97.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	373.348.389		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
98.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	9.999.996.200		Dinas Sumber Daya Air
99.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	11.092.117.632		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
100.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.501.901.840		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
101.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	70.620.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
102.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	222.240.224		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
103.	Program Pengembangan Ekspor	13.267.660.138		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
104.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	13.826.838.201		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
105.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	13.342.490.919		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
106.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	42.055.723.640		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
107.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	18.177.600		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
108.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	130.681.400		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
109.	Program Penataan Organisasi	36.423.518.964	1.	Biro Kerja Sama Daerah
			2.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
110.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	61.997.791.828	1.	Biro Kerja Sama Daerah
			2.	Biro Pemerintahan
111.	Program Kesejahteraan Rakyat	351.229.678.406	1.	Biro Kesejahteraan Sosial
			2.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
112.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.090.622.146		Biro Hukum
113.	Program Perekonomian dan Pembangunan	45.194.483.480	1.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
			2.	Biro Perekonomian dan Keuangan
114.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.499.709.753		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
115.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	681.905.568	1.	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
			2.	Biro Perekonomian dan Keuangan
116.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	532.974.255.116		Sekretariat DPRD

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
117.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18.332.383.505		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
118.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.150.532.200		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
119.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.106.465.867.213		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
120.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	110.471.859.339	1.	Badan Pengelolaan Aset Daerah
			2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
121.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	196.450.806.961		Badan Pendapatan Daerah
122.	Program Kepegawaian Daerah	28.121.343.794		Badan Kepegawaian Daerah
123.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.770.034.974		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
124.	Program Riset dan Inovasi Daerah	28.044.220.630		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
125.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	59.644.285.388		Inspektorat
126.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	16.666.091.752		Inspektorat
127.	Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan	1.197.253.746.764	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
128.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.587.914.362.650	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
129.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	599.742.396.070	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
130.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.759.047.504	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
			6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
131.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	16.807.866.555	1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
			2.	Kota Administrasi Jakarta Utara
			3.	Kota Administrasi Jakarta Barat
			4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
			5.	Kota Administrasi Jakarta Timur
132.	Program Pengelolaan Kabupaten Administrasi	3.752.889.278		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
133.	Program Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi	28.328.513.769		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
134.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20.577.270.647		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
135.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	73.952.324.612		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	NO.	PERANGKAT DAERAH
136.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.300.465.272		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
137.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	14.503.502.264		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
138.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	405.202.388.220		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG